

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas tentang model pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Adapun penelitian yang dijadikan perbandingan adalah hasil penelitian yang berkaitan tentang pemberdayaan masyarakat yaitu :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Rosita Desiati (Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu Pendidikan) yang dilakukan pada tahun 2013 dengan judul penelitian Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Program Desa Wisata. Penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Kreet, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta dengan rumusan masalah bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan program Desa Wisata oleh Pokdarwis Kreet Binangun dan apa saja faktor pendukung dalam pemberdayaan yang dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh Rosita Desiati fokus terhadap bagaimana pelaksanaan program desa wisata yang diterapkan di desa kreet sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sedangkan fokus peneliti disini untuk mengetahui bagaimana model pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata serta bagaimana peran pokdarwis dalam proses pemberdayaan masyarakat.

5

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Tuty Herawati (Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta Jurusan Administrasi Niaga) yang dilakukan pada tahun 2011 dengan judul penelitian Model Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Desa Wisata di Depok.

⁵Rosita Desiati, 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Program Desa Wista*. diakses pada tanggal 09 Januari 2018

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Sawangan Baru Depok. Penelitian yang dilakukan oleh Tuty Herawati lebih terfokus mengidentifikasi potensi yang dimiliki di kedua kelurahan yakni kelurahan Pasir Putih dan Sawangan Depok untuk menjadi desa wisata serta bagaimana peran serta masyarakat desa dalam pengembangan pariwisata yang merupakan program pemerintah daerah sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di Depok. Data diperoleh langsung dari responden yaitu, petani, pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah. Object yang disurvei adalah sumber daya yang dimiliki oleh desa, meliputi sumber daya alam, budaya dan cara hidup, seni, hasil karya, fasilitas dan sejarah dari kelurahan tersebut. Sedangkan fokus peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana model pemberdayaan yang diterapkan oleh Pokdarwis Ngrayudan dalam pengembangan desa wisata.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Henki Wibowo (Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang) yang dilakukan di tahun 2009 dengan judul tesis Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Industri Pariwisata dengan rumusan masalah Bagaimana model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT selecta dalam mengembangkan industri pariwisata serta sejauhmana keterlibatan masyarakat sekitar dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh PT selecta. Penelitian yang dilakukan Henki memiliki kesamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama fokus dalam mengetahui bagaimana model pemberdayaan masyarakat. Perbedaannya yakni peneliti ingin mengetahui bagaimana model pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata yang ada di Ngrayudan sedangkan Henki ingin mengetahui model

⁶ Model Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vo.10 No.2

pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Pariwisata di Selecta. Hasil dari penelitian ini Henki menemukan model pemberdayaan masyarakat yang diterapkan PT selecta dalam mengembangkan pariwisata yakni dengan model pemberdayaan partisipasi masyarakat yang berasaskan kekeluargaan.⁷

2.2 Konsep Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses memperoleh daya/kekuatan, dan proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang berdaya. Priyono dan Pranaka menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti, pengertian pemberdayaan yang pertama adalah *to give power or authority*. Pengertian yang pertama ini meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan kepada pihak yang belum berdaya. Pengertian yang kedua *to give ability to or enable*. Dapat dimaknai bahwa pengertian kedua ini adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Menurut Parson dikutip oleh Suharto, menyebutkan bahwa konsep pemberdayaan adalah suatu proses pembangunan melalui kegiatan sosial yang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dan mandiri tentunya dapat memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik.⁸ Pemberdayaan juga merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok rentan dan lemah di masyarakat yang memiliki kekuasaan atau kemampuan dalam (1) memenuhi kebutuhan dasarnya

⁷ Wibowo Henki, 2009. *Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Industri Pariwisata*.

⁸ Edi Suharto, 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. hlm. 58-59

sehingga mereka memiliki kebebasan (Freedom) (2) bukan saja bebas mengemukakan pendapat namun bebas dari kebodohan, bebas dari kelaparan, bebas dari masalah kesehatan dan mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan (3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.⁹

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan merupakan proses pembangunan/serangkaian kegiatan memberikan kekuatan sosial untuk mendorong kemandirian masyarakat dan memperkuat keberdayaan kelompok yang lemah yang berada di masyarakat untuk lebih menjadi orang yang produktif dan mencapai kehidupan yang lebih baik.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kartasmita inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan, memperkuat potensi atau daya (empowering), terciptanya kemandirian. Pada hakikatnya, pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut belum di ketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian di kembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping kehendaknya

⁹ Edi Suharto, 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Hlm. 60-61

pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), sehingga hendaknya pemberdayaan mengantarkan pada proses kemandirian.¹⁰

Pemberdayaan sebagai upaya penguatan dan peningkatan kapasitas, peran, dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan, untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif sebagai subyek atau pelaku maupun sebagai penerima manfaat dalam pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan¹¹.

Dalam prosesnya, pemberdayaan merupakan kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan akhir dari pemberdayaan sendiri yakni untuk mengembangkan kemampuan seseorang, khususnya kelompok lemah dan rentan sehingga mereka punya kemampuan untuk (1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka mampu untuk terbebas dari kebutuhan dasar, (2) Mengidentifikasi sumber produktif sehingga mereka mampu mengembangkan untuk meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang di butuhkan, (3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang dapat mempengaruhi bagi mereka. Sebagai tujuan menurut Suharto, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin di capai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹²

¹⁰ Kartasasmita, Gnanjar. 1996. *Sebuah Telaah Mengenal Konsep Pemberdayaan Masyarakat*.

¹¹ Kemenpar.go.id . *Pemberdayaan masyarakat Labuan Bajo Untuk Keberlangsungan Industri*. (di akses pada tanggal 09 Februari 2018 pukul 13.30)

¹² Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama. hal 210-224

Definisi pemberdayaan sebagaimana yang dikatakan oleh clutter buck memiliki lima dimensi, yaitu 1. Mendorong, 2. Tanggung Jawab, 3. Memperbaiki cara kerja, 4. Menyumbang (kontribusi), 5. Pencapaian tujuan. Kontribusi yang dikemukakan menunjukkan bahwa makna pemberdayaan tidak hanya diartikan secara ekonomi, dimana individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi menyangkut kepercayaan diri setiap individu, harga dirinya, dan nilai-nilai budaya organisasi harus ditetapkan secara seimbang.¹³

Menurut definisi-definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pelaku pemberdayaan sebagai bentuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian individu maupun kelompok dalam masyarakat. Selain itu masyarakat juga dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan pemberdayaan karena masyarakat diberi kekuasaan penuh untuk menentukan apa yang mereka inginkan dan mampu bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka pilih untuk jalan hidupnya.

Beberapa Ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, dan cara pemberdayaan Suharto :

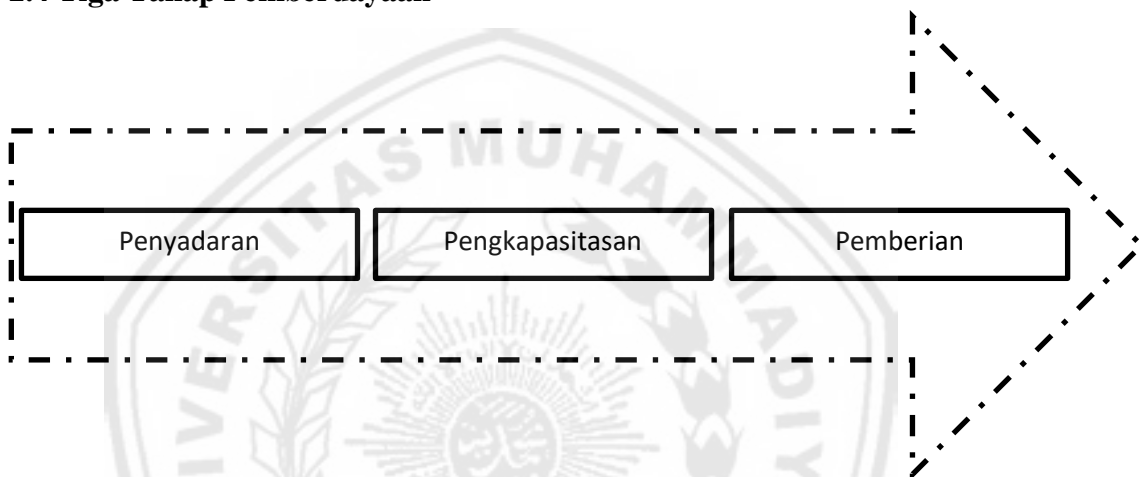
- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (ife)
- b. Pemberdayaan adalah Pemberdayaan menekankan bahwa orang-orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya Parsons

¹³ Makmur, Syarif. 2008. Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat dan Efektifitas Organisasi . Jakarta. PT: Raja Grafindo Pustaka. Hal 54

c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (swift dan levin)¹⁴

Tujuan pemberdayaan sendiri menurut Ife dalam buku Miftachul Huda menyebutkan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (power) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Pemberdayaan pada dasarnya memiliki dua kata kunci, yakni power dan disadvantaged.¹⁵

2.4 Tiga Tahap Pemberdayaan



Gambar 1. Tiga Tahap Pemberdayaan Wrihatnolo, Dwidjowijoto tanpa Tahun 2:3

1. Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaraan bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Misal, target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberi pemahaman bahwa mereka dapat menajdia berada, dan tidak dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluaftr dari masyarakat miskin

¹⁴ Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayaan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.

¹⁵ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 272-273.

2. Tahap kedua adalah pengkapasitasan inilah yang sering kita sebut “capacity building” atau dalam bahasa yang lebih sederhana mapukan untuk diberikan daya atau kuasa yang berangkutan harus mampu terlebih dulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah, seharusnya daerah-daerah yang hendak diotonomikan diberi program kemampuan untuk membuat mereka “cakap” dalam mengolah otonomi yang diberikan. Proses capacity building terdiri dari tiga jenis :
- a. Pengkapasitasan manusia dalam arti mapukan manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok. Konsep ini sudah sering kita lakukan seperti, training (pelatihan), workshop (loka latih) seminar dan sejenisnya. Arti dasarnya adalah memberikan kapastan kepada individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan
 - b. Pengkapasitasan Organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapastan tersebut. Misal, sebelum diberikan peluang usaha, bagi kelompok miskin dibuatkan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR)
 - c. Pengkapasitasan ketiga adalah sistem nilai. Sistem nilai adalah “aturan main”. Dalam cakupan organisasi, sistem nilai berkenaan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Sistem dan Prosedur, Peraturan Korupsi dan sejenisnya. Pada tingkat yang lebih maju, sistem nilai terdiri pula atas daya organisasi, etika, dan good governance.
3. Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau “ empowerment” dalam makna sempit. Pada tahap ini, kepada target diberi daya, kekuasaan, otoritas

atau peluang. Pemberian ini disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki (Wrihatnolo, Dwidjowijoto tanpa tahun 2-5)

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus-menerus, komprehensif, dan simutan sampai tujuan pemberdayaan tercapai. Menurut Ndraha, diperlukan berbagai program pemberdayaan diantaranya :¹⁶

- a. Pemberdayaan politik, yang bertujuan meningkatkan daya tawar (bargaining position) yang diperintah terhadap pemerintahnya. Bargaining dimaksudkan agar yang diperintah mendapatkan apa yang menjadi haknya dalam bentuk barangm jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan pihak yang lain. Utomo menyatakan bahwa birokrasi yang berdaya dan tangguh adalah yang memiliki kualitas kehidupan kerja (quality of work life) yang tinggi dan berorientasi kepada ; (1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan (participation in decision making), (2) program pengembangan karir (career development prgram), (3) gaya kepemimpinan (leadership style), (4) derajat tekanan yang dialami oleh karyawan (the degrees of stress experienced by employess), (5) budaya organisasi (the culture of the organisation)
- b. Pemberdayaan ekonomi, digunakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar dapat berfungsi sebagai penanggung dari dampak negativ pertumbuhan, pemikul nenam pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.
- c. Pembedayaan sosial budaya, ini bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui human investment guna meningkatkan

¹⁶ Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kronologi; Ilmu Pemerintahan Baru* . Jakarta: Direksi Cipta. hlm. 132.

nilai manusia (human dignity), penggunaan (human utilization), dan perlakuan yang adil terhadap manusia.

- d. Pemberdayaan lingkungan, dilakukan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan.

2.5 Model Pemberdayaan.

Terkait dalam isu Pembangunan sosial dan Pemberdayaan, dalam bidang Ilmu Kesajahteraan Sosial dikenal bentuk intervensi makro, intervensi makro digunakan guna melakukan perubahan dan pemberdayaan pada tingkat komunitas dan organisasi. Intervensi komunitas itu sendiri pada dasarnya terdiri dari beberapa model intervensi antara lain yang di kemukakan oleh glen yang mengacu pada model intervensi *community devolopment* (pengembangan masyarakat) *community work* (aksi komunitas) dan *community services approach* (pendekatan pelayanan masyarakat). Rothman, Tropman dan Erlich mereka melihat bahwa intervensi komunitas mencakup beberapa model intervensi ‘pengembangan masyarakat lokal’ (*locality development*), ‘perencanaan sosial’ (*social planning*), ‘aksi sosial’ (*social action*), ‘kebijakan sosial’ (*social policy*), dan ‘administrasi dan manajemen’ (*administrasion and management*)

Dalam kaitan dengan upaya pemberdayaan pada level komunitas, Rothman menggambarkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui intervensi komunitas ini dapat dilakukan melalui beberapa model pendekatan intervensi seperti yang dijelaskan di bawah ini :

Tabel 1. Tiga Model (Pendekatan) Intervensi Komunitas

	Model A (Pengembangan Masyarakat Lokal)	Model B (Perencanaan dan Kebijakan Sosial)	Model C (Aksi Sosial)
1.Kategori tujuan tindakan terhadap masyarakat	Kemandirian : Pengembangan kapasitas dan pengintegrasian masyarakat (tujuan yang dititik beratkan pada proses = <i>proces goals</i>)	Pemecahan masalah dengan memperhatikan masalah yang penting yang ada pada masyarakat (tujuan dititik beratkan pada = <i>task-goals</i>)	Pergeseran (pengalihan) sumber daya dan relasi kekuasaan; perubahan institusi dasar (task ataupun process goals)
2.Asumsi mengenai struktur komunitas dan kondisi permasalahan lainnya	Adaya anomie dan ‘kemurungan’ dalam masyarakat; kesenjangan relasi dan kapasitas pemecahan masalah secara demokratis; komunitas berbentuk tradisional statis.	Masalah sosial yang sesungguhnya; kesehatan fisik dan mental, perumahan dan rekreasional.	Populasi yang dirugikan; kesenjangan sosial, perampasan hak, dan ketidakadilan.
3.Strategi perubahan dasar	Pelibatan berbagai kelompok warga dalam menentukan dan memecahkan masalah mereka sendiri	Pegumpulan data yang terkait dengan masalah, dan memilih serta menentukan bentuk tindakan yang paling rasional.	Kristalisasi dari isu pengergonasisasian massa untuk menghadapi sasaran yang menjadi musuh mereka.
4.Karakteristik taktik dan teknik perubahan	Konsensus; komunikasi antar kelompok dan kelompok kepentingan dalam masyarakat (komunitas); diskusi kelompok	Konsensus atau konflik.	Konflik atau kontes; konfrontasi; aksi yang bersifat langsung negoisasi.

5.Peran praktisi yang menonjol	Sebagai Enablerkalitas, koordinator; orang yang men-‘ajar-kan ketrampilan memecahkan masalah dan nilai-nilai etis.	Pengumpul dan penganalisis data, pengimplemantasi program, dan fasilitator.	Aktivis, advokat;agitator, pialang, negosiator, partisan
6.Media perubahan	Manipulasi kelompok kecil yang berorientasi pada terselesaikannya suatu tugas (<i>small task oriented groups</i>).	Manipulasi organisasi formal dan data yang tersedia	Manipulasi organisasi massa dan proses-proses politik
7.Orientasi terhadap struktur kekuasaan	Anggota dari struktur kekuasaan bertindak sebagai kolabolator dalam suatu ‘ventura’ yang bersifat umum	Struktur kekuasaan sebagai ‘pemilik’ dan ‘sponsor’ (pendukung)	Struktur kekuasaan sebagai sasaran eksternal dari tindakan yang dilakukan; mereka yang memberikan ‘tekanan’ harus dilawan dengan memberikan ‘tekanan’ balik
8.Batasan definisi dalam komunitas (konstituensi)	Keseluruhan komunitas geografis	Keseluruhan komunitas atau dapat pula suatu segmen dalam komunitas (termasuk komunitas fungsional)	Segmwn dalam komunitas
9. Asumsi mengenai kepentingan dalam kelompok-kelompok di dalam suatu komunitas	Kepentingan umum atau permufakatan dari berbagai perbedaan.	Permufakatan kepentingan atau konflik.	Konflik kepeningan yang sulit di capai kata mufakat; kelangkaan sumber daya
10. Konsepsi mengenai populasi klien (konstituensi)	Warga masyarakat	Konseumen (pengguna jasa)	‘Korban’
11. Konsepsi	Partisipan pada	Konsumen atau	Employer,

mengenai peran klien	proses intraksional pemecahan masalah	resipien (penerima layanan)	konstituen, anggota.
12. Pemanfaatan pemberdayaan (pemberdayaan digunakan untuk)	Mengembangkan kapasitas komunitas untuk mengambil keputusan bersama; serta membangkitkan rasa percaya diri akan kemampuan masing-masing anggota masyarakat	Mencari tahu dari para pengguna jasa tentang layanan apa yang mereka butuhkan; serta memberi tahu para pengguna jasa tentang pilihan jasa yang ada.	Meraih kesuksesan objektif bagi mereka yang 'tertindas' agar dapat memilih dan memutuskan cara yang tepat guna melakukan aksi; serta nenbangkitkan rasa percaya diri partisipan akan kemampuan mereka ¹⁷

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Rothman dan Tropman mengungkap perbedaan ketiga model tersebut menggunakan 12 variabel, berikut penjelasannya :

1. Kategori tujuan tindakan terhadap masyarakat

Terlihat dalam tabel bahwa terdapat dua tujuan utama terkait dengan pengorganisasian masyarakat yaitu yang pertama lebih mengacu pada 'tugas' dan yang lainnya lebih mengacu pada 'proses'. Kategori tujuan yang berorientasi pada tugas yaitu model B, lebih menekankan pada penyelesaian tugas-tugas mereka atau pemecahan masalah yang mengganggu fungsi sistem sosial misalnya penyediaan jenis layanan yang baru atau pembuatan terobosan dalam bidang perundang-undangan sosial. Sedangkan tujuan yang berorientasi pada proses yaitu model A dan model C, lebih menekankan pada perluasan dan pemeliharaan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan relasi kerja sama

¹⁷ Adi, Isbandi Rukminto.2001. *Pemberdayaan, Pengembangan dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI

dalam komunitas dan menstimulasi masyarakat agar mempunyai minat dan partisipasi yang luas terhadap isu-isu sosial dalam komunitas.

2. Asumsi mengenai struktur komunitas dan kondisi permasalahannya

Pada Model A : komunitas seringkali dipandang sebagai ikatan tradisional yang dipimpin oleh kelompok kecil pemimpin konvensional dan terdiri dari populasi yang buta huruf dan memiliki kesenjangan dalam keterampilan memecahkan masalah serta pemahaman mengenai proses demokrasi.

Pada Model B : seorang perencana sosial lebih melihat komunitas sebagai sejumlah kondisi masalah sosial inti yang bersifat khusus dengan kepentingan tertentu seperti masalah perumahan, pengangguran ataupun kesehatan.

Pada Model C : seorang praktisi aksi sosial memiliki cara berpikir yang berbeda, mereka lebih melihat komunitas sebagai hirarki dari *previllage* dan kekuasaan. Target dari mereka adalah mereka yang tidak mendapat keadilan, mendapat tekanan, diabaikan dan sebagainya.

3. Strategi perubahan dasar

Pada Model A : strategi perubahan dasar dicirikan dengan ungkapan 'marilah kita bersama-sama'. Dari ungkapan tersebut terlihat akan adanya upaya mengembangkan keterlibatan warga sebanyak mungkin dalam menentukan kebutuhan dan memecahkan masalah mereka.

Pada Model B : strategi dasar dicirikan dengan ungkapan 'marilah kita kumpulkan'. Seorang perencana biasanya berusaha untuk mengumpulkan fakta-fakta mengenai masalah yang dihadapi sebelum mereka memilih tindakan paling rasional dan tepat dilakukan.

Pada Model C : strategi dasar terlihat dari ungkapan ‘mari kita mengorganisir diri agar dapat melawan’. Ungkapan tersebut merupakan kristalisasi isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat yang kemudian membuat masyarakat mengenali ‘musuhnya’.

4. Karakteristik taktik dan tehnik perubahan

Pada Model A : taktik lebih ditentukan pada pencapaian konsensus. Hal ini biasanya dilakukan melalui komunikasi dan proses diskusi yang melibatkan berbagai macam individu maupun kelompok

Pada Model B : taktik dan teknik yang sangat berperan adalah teknik pengumpulan data dan keterampilan untuk menganalisis, bisa juga taktik konsensus maupun konflik, tergantung pada hasil analisis.

Pada Model C : para praktisi aksi sosial lebih menekankan pada taktik konflik dengan cara melakukan konfrontasi dan aksi langsung.

5 Dan 6. Peran praktisi dan Media Perubahan

Pada Model A : peran yang dilakukan lebih banyak mengacu pada peran sebagai *enabler* yaitu membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka, dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif. Media perubahannya adalah melalui kreasi dan manipulasi (positif) kelompok kecil yang berorientasi pada tugas.

Pada Model B : peran yang biasa digunakan adalah peranan sebagai *expert* (pakar) yang lebih menekankan pada penemuan fakta, implementasi program, dan relasi dengan birokrasi. Media perubahannya adalah manipulasi organisasi seperti juga dengan pengumpulan data dan analisis data.

Pada Model C :peran yang dilakukan lebih mengarah pada peran sebagai advokat dan aktivis. Media perubahannya adalah dengan menciptakan dan memanipulasi pengorganisasian dan pergerakan massa untuk mempengaruhi politis.

7. Orientasi terhadap struktur kekuasaan

Pada Model A : struktur kekuasaan sudah tercakup di dalam konsepsi mengenai komunitas itu sendiri. Setiap segmen komunitas dianggap sebagai bagian dari sistem klien. Anggota dari struktur kekuasaan diposisikan sebagai kolaborator dari ventura yang bersifat umum. Oleh karena itu hanya tujuan yang dapat memunculkan kesepakatan yang saling menguntungkan lah yang dapat diterima dan relevan sedangkan tujuan yang terlalu mencerminkan kepentingan segmen tertentu sering kali tidak diterima.

Pada Model B : struktur kekuasaan biasanya muncul sebagai sponsor atau 'boss' dari praktisi (perencana). Oleh karena itu Morris dan Binst-ock menyatakan bahwa sangatlah sulit bagi seseorang untuk membedakan antara para perencana dengan organisasi yang mempekerjakannya.

Pada Model C : struktur kekuasaan dianggap sebagai target eksternal dari suatu tindakan. Struktur kekuasaan seringkali dianggap sebagai kekuatan antitesis yang akan menekan klien (kelompok konstituen).

8. Batasan definisi sistem klien dalam komunitas (konstituensi)

Pada Model A : total komunitas biasanya didasarkan pada kesatuan geografis seperti Rukun Warga, Desa, Kota.

Pada Model B : klien bisa merupakan kesatuan geografis tetapi dapat pula merupakan kesatuan fungsionalnya (misalnya kelompok tuna grahita, kelompok profesi dokter, kelompok pecinta buku, dsb)

Pada Model C : klien biasanya merupakan segmen masyarakat yang membutuhkan bantuan. Mereka dapat dikatakan sebagai kelompok yang membutuhkan layanan tetapi tidak terjangkau oleh layanan tersebut; ataupun di tolak untuk mendapatkan layanan tersebut.

9. Asumsi mengenai kepentingan dari kelompok-kelompok di dalam suatu komunitas

Pada Model A : berbagai kelompok dan faksi dalam masyarakat dilihat secara mendasar merupakan permufakatan yang responsif terhadap pengaruh dari persuasi yang rasional, komunikasi dan niat baik bersama.

Pada Model B : tidak ada asumsi yang pervasif mengenai tingkat intraktabilitas ataupun konflik kepentingan. Pendekatan yang dilakukan lebih pragmatis dan berorientasi untuk menangani masalah tertentu. Sehingga permufakatan ataupun konflik dapat ditolerir dalam pendekatan ini selama tidak menghalangi proses pencapaian tujuan.

Pada Model C : ada asumsi bahwa kepentingan dari masing-masing bagian dalam masyarakat sangat bervariasi dan sulit diambil kata mufakat sehingga seringkali cara-cara koersif harus dilaksanakan seperti melalui pemboikotan sebelum penyesuaian dapat terjadi.

10. Konsepsi mengenai populasi klien (konstituensi)

Pada Model A : klien dipandang sebagai warga yang sederajat yang memiliki kekuatan yang perlu diperhatikan tetapi belum semuanya dapat dikembangkan secara optimal dengan memfokuskan pada kemampuan klien.

Pada Model B : klien dilihat sebagai konsumen dari suatu layanan dan mereka akan menerima serta memanfaatkan program dan layanan sebagai hasil dari proses perencanaan.

Pada Model C : klien lebih dilihat sebagai korban dari suatu sistem.

11. Konsepsi mengenai peran klien

Pada Model A : peran klien dikonsepsikan sebagai partisipan aktif dalam proses interaksional satu dengan yang lainnya.

Pada Model B : klien memainkan peranan sebagai penerima pelayanan. Klien aktif mengonsumsi (menggunakan) layanan-layanan yang diberikan tetapi bukan dalam proses menentukan tujuan dan kebijakan.

Pada Model C : klien biasanya merupakan 'bawahan' bersama dengan praktisi aksi sosial dan mereka berusaha 'mendobrak' sistem yang ada.

12. Pemanfaatan pemberdayaan (pemberdayaan digunakan untuk)

Pada Model A : pemberdayaan digunakan untuk mengembangkan kapasitas komunitas untuk mengambil keputusan bersama serta membangkitkan rasa percaya diri akan kemampuan masing-masing anggota masyarakat

Pada Model B : pemberdayaan digunakan untuk mencari tahu dari para pengguna jasa tentang layanan apa yang mereka butuhkan, serta memberi tahu para pengguna jasa tentang pilihan jasa yang ada.

Pada Model C : pemberdayaan digunakan untuk meraih kekuasaan objektif bagi mereka yang 'tertindas' agar dapat memilih dan memutuskan cara yang

tepat guna melakukan aksi, serta membangkitkan rasa percaya diri partisipan akan kemampuan mereka.

2.6 Konsep Masyarakat

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut sebagai *society*, asal kata *socius* yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab yaitu *syirk* yang berarti bergaul hal ini karena ada bentuk aturan hidup karena manusia hidup perseorangan melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain yang ada dalam lingkungan yang merupakan suatu kesatuan. Menurut Syani mendefinisikan bahwa “Masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang serta memandang bahwa *community* sebagai unsur statis yang berarti *community* berbentuk dalam suatu wadah/tempat dengan batas-batas tertentu yang telah disepakati, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial, nilai dan norma yang ada timbul akibat adanya interaksi atau hidup bersama manusia. Kedua *community* dipandang sebagai unsur dinamis, artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka didalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan dan tujuan yang sifatnya fungsional.”¹⁸

¹⁸digilib.unila.ac.id

1.7 Konsep Wisata

1. Pengertian Wisata dan Pariwisata

Pariwisata dalam Bahasa Inggris *tourism*, menurut Horby *tourism is a journey out and home again during which several or many places are visited* jadi pariwisata adalah upaya perjalanan keluar umah mengunjungi beberapa tempat upaya menyelenggarakan kegiatan yang berupa gelaran obyek alam, sosial dan budaya yang bersifat koersil. Menurut Fajri Pariwisata adalah kegiatan yang berkenaan dengan rekreasi yang obyeknya gunung, laut, danau dan peninggalan.

Undang-Undang Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, pengusaha pemerintah dan pemerintah daerah¹⁹. Dipandang dari dimensi akademis, pariwisata merupakan studi yang mempelajari perjalanan manusia keluar dari lingkungannya, termasuk industri yang merespon kebutuhan manusia yang melakukan perjalanan.

Menurut Wahab Pariwisata adalah salah satu industri gaya baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan. Lagi pula pariwisata sebagai sektor kompleks, meliputi industri-industri dalam arti yang klasik, seperti misalnya industri

¹⁹Kemenpar.go.id UU kepariwisataan (diakses pada tanggal 05 Januari 2018)

kerajinan tangan dan industri cinderamata, penginapan dan transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri.²⁰

Menurut Gelgel, pariwisata adalah suatu kegiatan yang menyediakan jasa akomodasi, transportasi, makanan, rekreasi serta jasa-jasa lainnya yang terkait. Dalam aspek perdagangan pariwisata melibatkan berbagai aspek seperti aspek ekonomi, budaya sosial, agama, lingkungan, keamanan, dan aspek lainnya.

Pitana dan Gayati mengatakan bahwa pariwisata mencakup tiga elemen utama yaitu :

- a. *A dynamic element*, yaitu travel ke suatu destinasi wisata.
- b. *A static element*, yaitu singgah di daerah tujuan.
- c. *A consequential element*, atau akibat dari dua hal diatas (khususnya pada masyarakat lokal), yang meliputi dampak ekonomi, sosial-budaya dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan.²¹

2.8 Konsep Desa Wisata

Istilah desa di Indonesia adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang di pimpin oleh kepala desa. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, pasal 1 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui pemerintah nasional dibawah kabupaten²².

Desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kemampuan unsur-unsur yang dimiliki atribut produk wisata secara

²⁰ Wahab, Salah. 2003. *Manajemen Kepariwisata*. PT Pradnya Paramita. Hal:5

²¹ Gelgel, I putu. 2006. *Industri Pariwisata Indonesia*. PT Refika Utama Press. Hal:22

²² Dpr.go.id UU tahun 1999 (diakses pada tanggal 07 Februari 2018)

terpadu, di mana desa tersebut menawarkan secara keseluruhan suasana yang dimiliki tema dengan mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari tatanan segi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan adat keseharian yang memiliki ciri khas arsitektur serta tata ruang desa menjadi suatu rangkaian aktifitas pariwisata.²³

Menurut Hermawan desa wisata merupakan kawasan berupa lingkungan pedesaan yang memiliki daya tarik wisata berbasis kearifan lokal seperti adat-istiadat, budaya, serta kekayaan alam yang memiliki keunikan dan keaslian berupa ciri khas suasana pedesaan. Kawasan pedesaan yang dikola yang dijadikan desa wisata biasanya memiliki lebih dari satu atau gabungan dari berbagai daya tarik wisata, agrowisata dan budaya dalam satu kawasan desa wisata.

Desa wisata merupakan kawasan yang berkaitan dengan wilayah atau berbagai kearifal lokal yang ada seperti budaya, adat-istiadat, dan potensi yang dikelola sebagai daya tarik wisata sesuai dengan kemampuan yang ada ditujukan untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Kearifan lokal yang dimaksud merupakan pengetahuan yang khas yang dimiliki di suatu masyarakat atau budaya tertentu yang telah berkembang sekian lama di lingkungan masyarakat sebagai hasil timbal balik dengan lingkungan

Pada dasarnya desa wisata lebih menonjolkan kearifan lokal yang ada dan budaya setempat. Di samping itu, pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat setempat dengan memanfaatkan potensi alam, budaya, ekonomi, sosial, budaya serta tata ruang yang ada. Komponen utama dalam desa wisata antara lain : (a) Akomodasi, sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. (b) Atraksi, seluruh

²³Ditjen Pariwisata. *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Jakarta,1999)

kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif misalnya, kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik.

Desa wisata merupakan suatu bentuk integritas antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.²⁴ Pengembangan konsep desa wisata dinilai sangat efektif dalam rangka mengenalkan serta memberi peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat pedesaan untuk memahami dunia pariwisata serta menikmati hasil dari kepariwisataan tersebut. Bagi daerah yang memiliki karakteristik dan keunikan terutama di keseharian masyarakat desa wisata dengan pengembangan konsep ini sangat direkomendasikan.

Terdapat dua konsep utama dalam komponen desa wisata :

1. Akomodasi : sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
2. Atraksi : Seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti : kursus tari bahasa dan lain- lain yang lebih spesifik.

Dalam pembentukan desa wisata perlu adanya standarisasi, standarisasi yang dimaksud mencakup lima aspek penting yakni daya tarik, sarana penunjang,

²⁴ Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Oerspective and Challenges. *Makalah bagian dari laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 2-3

pemasaran dan wisatawan itu sendiri dan komitmen keterbukaan masyarakat dalam menerima wisatawan.²⁵

Pada pendekatan ini diperlukan beberapa kriteria yaitu :

- a. Atraksi wisata; yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa.
- b. Jarak Tempuh; adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan jarak dari ibukota kabupaten
- c. Besaran Desa ; menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa.
- d. Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan; merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. perlu ditimbang adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada.
- e. Ketersediaan infrastruktur; meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya

²⁵ Ask Indonesia.com on (diakses pada tanggal 01 Februari 2018)